

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)



Disampaikan oleh :
ANTONI SUBENO, SH.
Fasilitator PUG Provinsi Riau
Bengkalis, 16 Juli 2025





Kebijakan Internasional

- UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
- *Beijing Platform for Action* (BPfA),

Kebijakan Nasional

- UUD 1945 (Keadilan sosial bagi semua)
- UU 23/2004: PKDRT
- UU 17/2007: RPJPN Tahun 2005-2025; UU 59/2024: RPJPN Tahun 2025-2045
- UU 39/1999: HAM
- UU 6/2016: Desa
- UU 12/2022: TPKS
- UU 4/2024: KIA Pada Fase Seribu HPK
- Perpres RPJMN dan RKP
- Perpres 111/2022: pelaksanaan TPB/SDGs
- Inpres No. 9/2000: PUG dalam Pembangunan Nasional
- Permenkeu 62/2023: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansidan Pelaporan Keuangan. Penganggaran K/L (*Gender Action Budget*)

Kebijakan Daerah

- UU 23/2014: UU Pemda
- PermenPPPA 3/2023: Urusan Pemerintahan Konkuren PPPA
- Permendagri 67/2011: Pedum Pelaksanaan PUG di Daerah
- Permendagri 86/2017
- Permendagri 90/2019: Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemuatakhirannya
- Permendagri Penyusunan RKPD (revisi tahunan)
- Permendagri Penyusunan APBD (revisi tahunan)
- Imendagri No 2 Tahun 2025

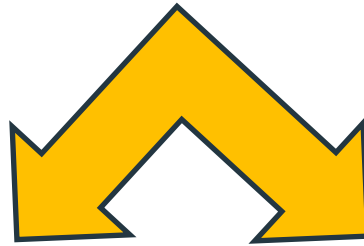


PPRG

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.

PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER:
terintegrasi kedalam dokumen perencanaan:
RPJM, Renstra,
RKP dan Renja

PRG



PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER:
terintegrasi ke dalam dokumen penganggaran
(RKA, DIPA)

ARG

PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

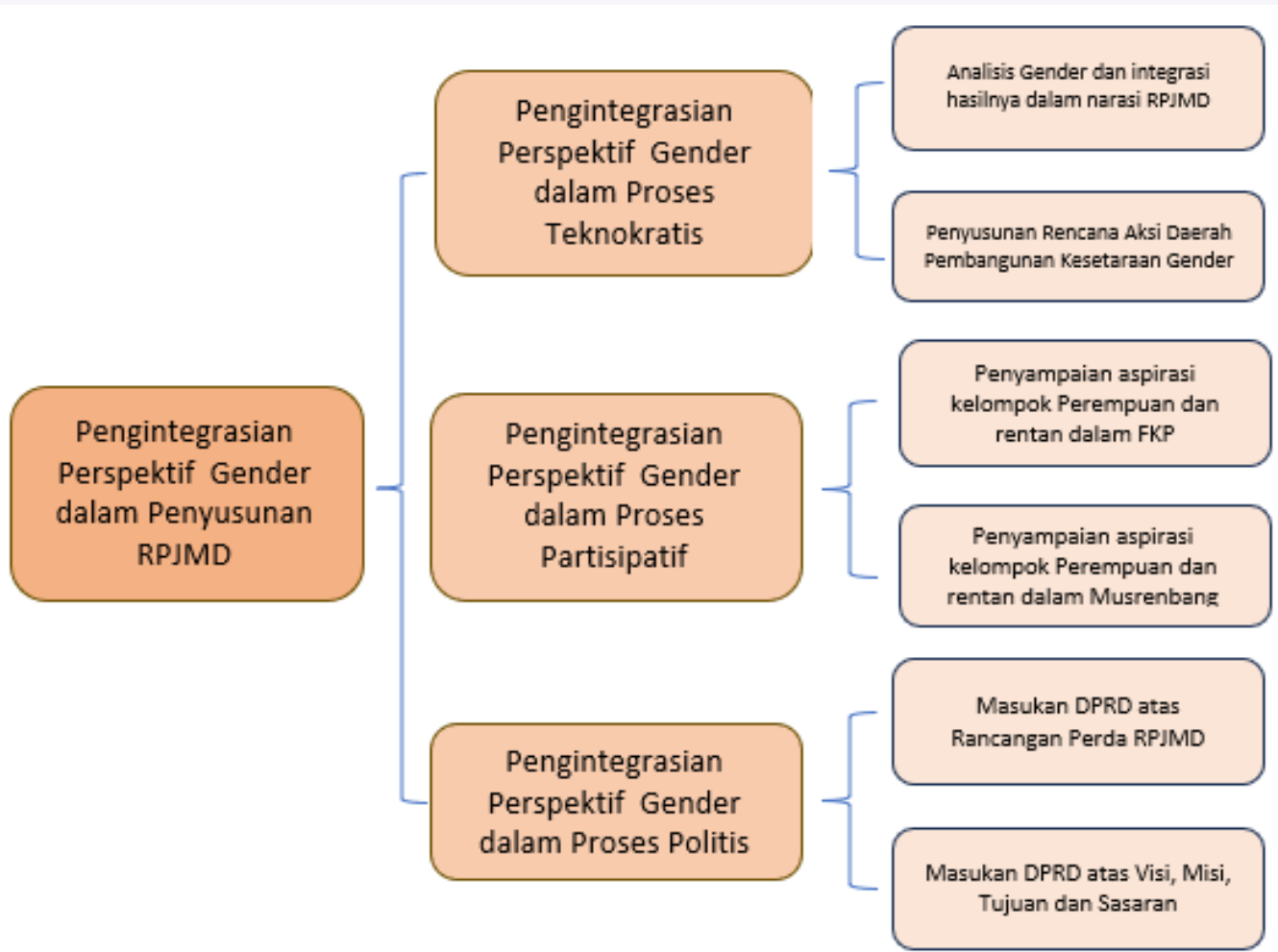
- Perencanaan yang partisipatif dengan *mempertimbangkan* empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan;
- *Mengintegrasikan* aspirasi, kebutuhan, permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan (pug);
- *Didasarkan* kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah/statistik gender (gap);
- Program aksi yang disusun bertujuan *mengatasi isu gender/kesenjangan gender*.

PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Dalam melakukan integrasi gender, instrumen GAP digunakan untuk penyusunan Perencanaan Responsif Gender (PRG) dalam dokumen :

- RPJMD
- Renstra SKPD
- RKPD
- Renja SKPD

Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Proses Penyusunan RPJMD



Pengintegrasian perspektif gender dalam proses penyusunan RPJMD terdiri dari beberapa tahapan utama:

- Pengintegrasian Perspektif Gender di Proses Teknokratis
- Pengintegrasian Perspektif Gender di Proses Partisipatif
- Pengintegrasian Perspektif Gender di Proses Politis dengan DPRD

Tabel: Gender Analysis Pathway

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
- Isu gender strategis diidentifikasi di sektor yang diampu oleh masing-masing - Telaah atas kondisi saat ini disertai dengan data-data terpilih berdasarkan jenis kelamin.	- Identifikasi faktor penyebab di ranah masyarakat dan ranah pemerintah - Identifikasi sampai ke akar masalah.	- Susun rencana aksi(rencana intervensi) untuk mengatasi faktor penyebab di Langkah 2 - Gunakan pendekatan Kerangka Kerja Logis yang holistik integratif	- Identifikasi PD yang relevan untuk masing-masing aksi yang telah disusun di Langkah 3. - Identifikasi Program yang relevan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi

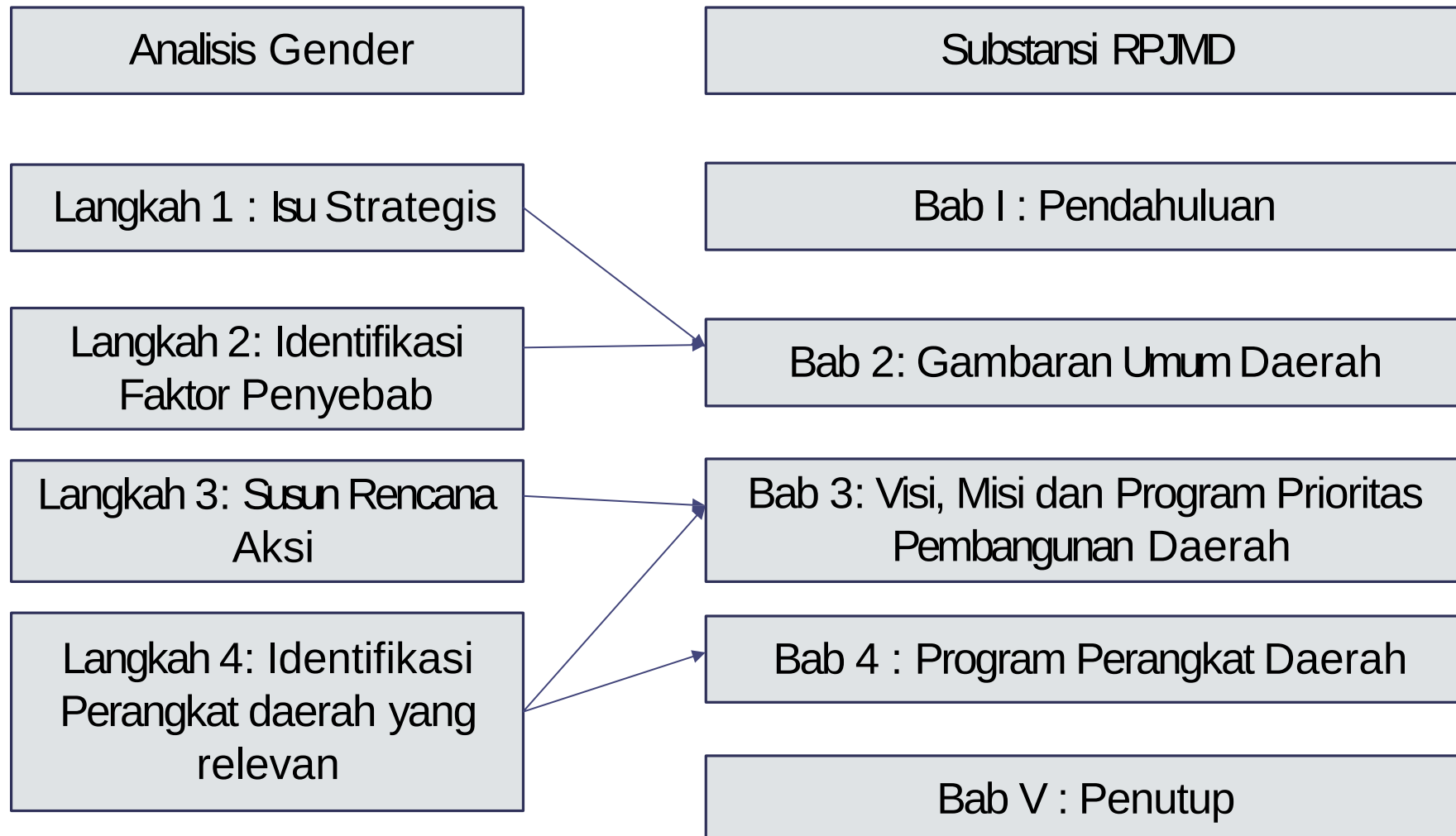
Analisis gender:

- Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilih berdasarkan jenis kelamin
- Mencakup analisis kontekstual

Sumber data:

- Data BPS
- Data Sektor yang disusun K/L/D
- Publikasi studi
- Data primer melalui wawancara dan FGD

KETERKAITAN HASIL ANALISIS GENDER DAN SISTEMATIKA RPJMD





Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB I PENDAHULUAN	
Bab 1 paling sedikit memuat: 1. Latar belakang; 2. Dasar hukum penyusunan; 3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 4. Maksud dan tujuan; dan 5. Sistematika penulisan.	
	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah • Perda PUG (jika ada)



Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI

INTEGRASI GENDER

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Sub-bab Gambaran Umum Kondisi paling sedikit memuat:

- a. Aspek geografi dan demografi
- b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- c. Aspek Daya Saing Daerah
- d. Aspek Pelayanan Umum

2. Subbab Permasalahan Dan Isu paling sedikit memuat:

- a. Permasalahan pembangunan daerah.
- b. Isu strategis daerah

a. Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah Aspek geografi dan demografi, Daerah sajikan:

- Data jumlah penduduk terpilah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
- Sajikan narasi terkait potensi perempuan dan laki-laki sebagai sumber daya pembangunan.

Contoh: Tuliskan narasi "perempuan merupakan setengah dari penduduk yang memiliki potensi yang setara untuk menjadi sumber daya pembangunan Strategis daerah di provinsi XX.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, sajikan:

- data terpilah dan isu gender strategis di sektor ekonomi.
- data terpilah dan isu gender strategis di sektor pendidikan.
- data dan isu gender strategis di sektor kesehatan.
- data capaian IKG dan IPG serta narasi pelaksanaan strategi PUG (status PPE, keaktifan dalam melaksanakan PUG, dst).
- permasalahan ketimpangan gender dan potensi perempuan sebagai sumber daya pembangunan dimuat sebagai salah satu isu strategis.

Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, paling sedikit memuat : - Visi dan Misi; dan - Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Visi RPJMD adalah rumusan umum mengenai daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Misi RPJMD adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya vial selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN . Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.	Integrasi gender di Bab III disusun dengan melakukan cascading kinerja dari visi misi sampai dengan program prioritas kepala daerah (Langkah 3 dan 4 GAP) . Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran: keadaan/kondisi • cantumkan tujuan meningkatkan kesetaraan sebagai gender/menurunkan ketimpangan gender • cantumkan sasaran meningkatnya kesetaraan gender/menurunnya ketimpangan gender. • cantumkan IPG dan IKG sebagai Indikator Kinerja RPJMD. Utama (IKU) dalam indikator sasaran menurunnya ketimpangan gender.

Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, paling sedikit memuat: a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.	• cantumkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kesetaraan gender yang selaras dengan analisis situasinya • cantumkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran pembangunan lainnya memuat “gender targeted intervention” dan “gender integrated intervention” yg relevan. • cantumkan daftar program prioritas sudah untuk mencapai sasaran RPJMD terkait pembangunan kesetaraan gender yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi. • cantumkan “Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” dalam Daftar program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD lainnya.

Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB IV PROGRAM PERANGKAT KERJA DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Sub-Bab Program Perangkat Daerah, paling sedikit memuat: - Daftar program Perangkat Daerah Tahun dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. - Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah. Bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat: - Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) - Target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).	- Cantumkan Program dan indikator outcome Urusan PPPA yang sesuai dengan cascading kinerja sasaran pembangunan kesetaraan gender di RPJMD - Cantumkan Program di urusan-urusan lain (non urusan PPPA) yang berkontribusi utk mencapai Sub-kinerja sasaran kesetaraan gender di RPJMD dalam daftar program di urusan masing-masing



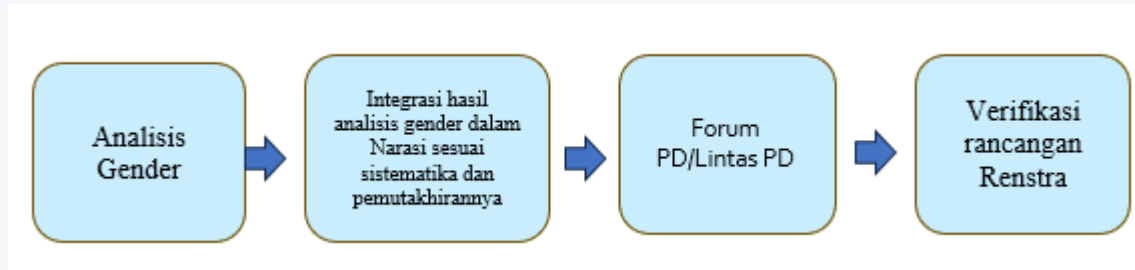
Langkah Pengintegrasian Isu Gender Dalam RPJMD

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB V PENUTUP	
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.	Cantumkan narasi terkait strategi PUG dan Inklusi Sosial di kaidah pelaksanaan yang wajib dilaksanakan.

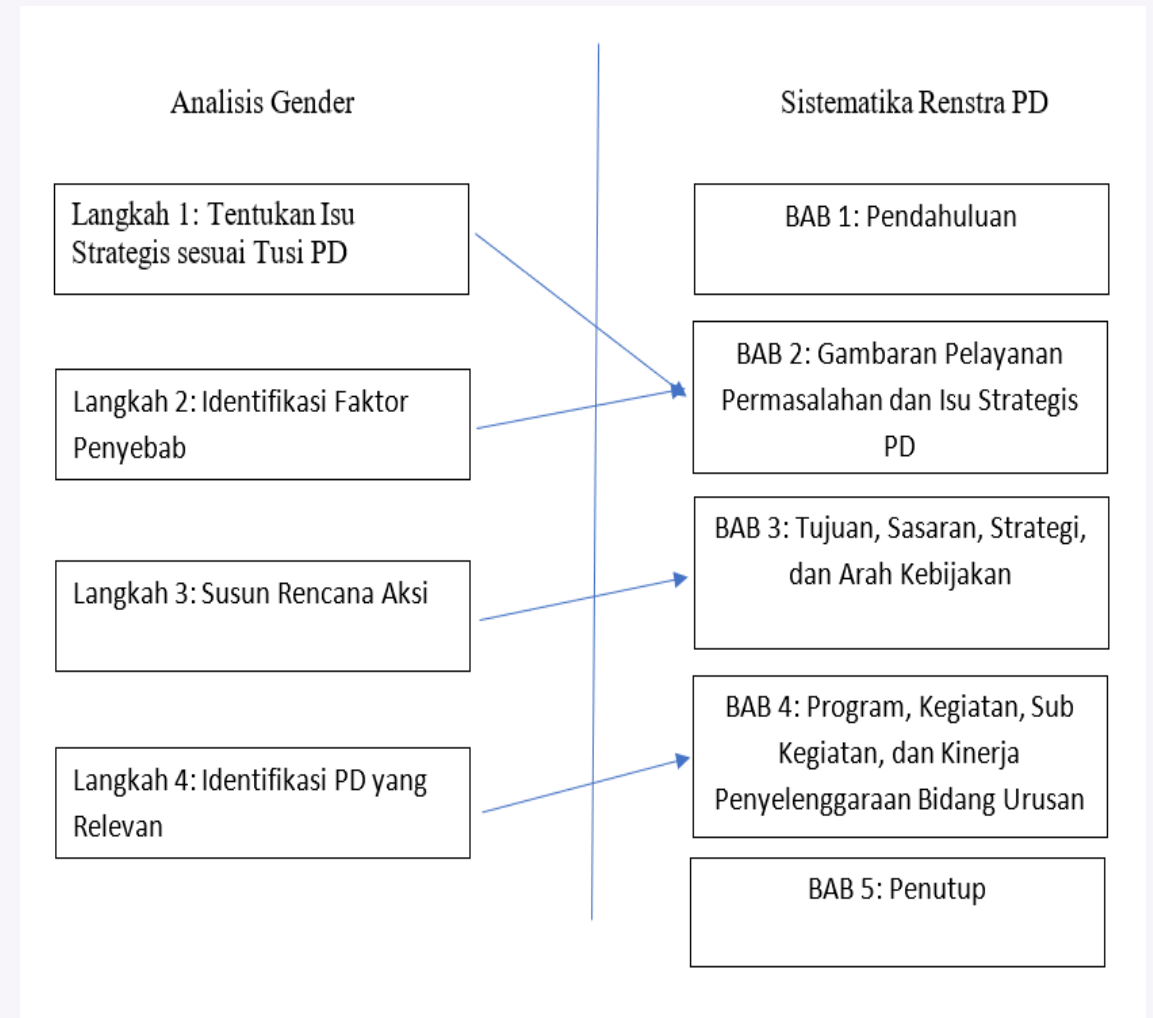




Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



- **Aktivitas 1: Analisis gender sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah**
- **Aktivitas 2: Integrasi hasil analisis gender dalam narasi sesuai sistematika dan pemuatakhirannya**
- **Aktivitas 3 Forum PD/Lintas PD**
- **Aktivitas 4: Verifikasi Rancangan Renstra**



Langkah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB I PENDAHULUAN	
Bab 1 paling sedikit memuat: 1. Latar belakang; 2. Dasar hukum penyusunan; 3. Maksud dan tujuan; dan 4. Sistematika penulisan.	• Latar belakang – uraikan ketimpangan gender (data IPG, IKG, kekerasan, kemiskinan perempuan, dsb.) yang jadi alasan Renstra perlu responsif gender. • Dasar hukum – cantumkan Inpres 9/2000, Permendagri 67/2011, Perda terkait PUG, peraturan lainnya yang terkait pembangunan kesetaraan gender. • Maksud–tujuan – tegaskan komitmen PD “mendukung pencapaian kesetaraan gender & pemberdayaan kelompok rentan” (align dengan misi daerah)

Langkah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, paling sedikit memuat: - Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; - Sumber daya Perangkat Daerah; - Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan - Kelompok sasaran layanan 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, paling sedikit memuat: - Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan - Isu strategis.	1. Gambaran Pelayanan - Tupoksi & Struktur – tampilkan proporsi pegawai & pejabat per jenis kelamin, disabilitas, usia; jelaskan keberadaan Pokja PUG. - Sumber daya – analisis kapasitas SDM & anggaran untuk PUG (APBD responsif gender, pelatihan). - Kinerja pelayanan – sajikan capaian SPM/Tupoksi dengan data terpilah (L/P, difabel, lansia, anak); sertakan gap layanan. - Kelompok sasaran – petakan penerima manfaat per jenis kelamin & kelompok rentan; gunakan matriks akses–partisipasi–kontrol–manfaat (APKM). 2. Permasalahan & Isu Strategis - Identifikasi akar masalah yg menimbulkan ketimpangan (regulasi, kultur, kapasitas, data, pendanaan). - Susun 3-5 isu strategis gender-spesifik yg relevan dgn urusan PD, - misalnya. “rendahnya partisipasi ekonomi perempuan di sektor ...”, atau “keterbatasan perempuan akses kredit”.

Langkah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
Bab III paling sedikit memuat: 1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029; 2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.	• Tujuan Renstra – tambahkan rumusan “Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam ... (urusan PD)”. • Sasaran – tetapkan sasaran “Menurunnya ketimpangan gender pada ...” dengan IKU IPG/IKG atau indikator spesifik (mis. % perempuan wirausaha naik). • Strategi – uraikan gender targeted interventions (program/layanan khusus perempuan & kelompok rentan) dan gender integrated interventions (penyematan perspektif gender di seluruh program). • Arah kebijakan – perinci langkah GAP (Langkah 3-4): prioritas lokus, peningkatan investasi PUG, penguatan data terpilah, kolaborasi lintas PD.

Langkah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Bab IV paling sedikit memuat: 1. Uraian Program; 2. Uraian Kegiatan, 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif; 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	• Masukkan Program “Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan” (jika urusan PPPA). • Di setiap urusan lain, tandai subkegiatan yg berkontribusi pada sasaran gender (beri kode/tanda ARG). • Gunakan indikator kinerja outcome & output sensitif gender— mis.: jumlah perempuan penerima sertifikat, % perempuan terlatih, skor kepuasan pengguna L/P. • Target & pagu indikatif diarahkan untuk pengalokasian anggaran responsif gender (ARG); lampirkan hasil Gender Action Budget (GAB) singkat. • Pastikan tabel IKU PD mencantumkan indikator total & terpisah.

Langkah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

DESKRIPSI	INTEGRASI GENDER
BAB V PENUTUP	
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarican urusan pemerintahan daerah.	• Ringkasan komitmen: “PD akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender.” • Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi PUG: pelaporan tahunan data terpilah, penilaian PPE, dan pelibatan forum perempuan/difabel.





Pembagian Peran Pelaksanaan PUG di Proses Penyusunan Renstra PD

No	Proses	Bappeda	Dinas PPPA	Perangkat Daerah
1	Analisis gender sesuai dengan tugas dan fungsi PD			
2	Mengintegrasikan hasil analisis gender dalam narasi Renstra PD dan memutakhirkannya			
3	Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam melakukan analisis gender dan integrasinya			
4	Melakukan verifikasi substansi pengarusutamaan gender dalam rancangan Renstra PD dan rancangan akhir Renstra PD			
5	Menkoordinasikan pelaksanaan Forum Lintas PD untuk agenda pembangunan kesetaraan gender melalui strategi PUG			



ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Anggaran Khusus Target Gender:

Alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar satu kelompok berdasarkan hasil analisis gender.

Anggaran Kesetaraan Gender:

Alokasi anggaran untuk mengatasi masalah **kesenjangan gender**. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya.

Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender:

Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender. Kategori anggaran ini mencakup beberapa hal seperti pengembangan data pilah, maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait dengan Pengarusutamaan Gender. (Modul PPRG, KPPPA)



KRITERIA PEMILIHAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER (TEMATIK ARG)

Kategori satu:

Kegiatan yang dianggap mampu mengurangi atau menghilangkan adanya kesenjangan gender yaitu:

- Kegiatan yang dapat memberikan akses dan peran kepada perempuan dan laki-laki secara proporsional;
- Kegiatan yang memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki;
- Kegiatan yang dapat melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses dan tahapan-tahapan kegiatan.

Kategori dua:

Kegiatan yang khusus untuk menangani spesifik gender:

- Kegiatan bantuan perbaikan gizi bagi Ibu Hamil;
- Kegiatan KB pria;
- Pembinaan Kelompok Tani Wanita;
- Bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan UMK;
- dan lain-lain.

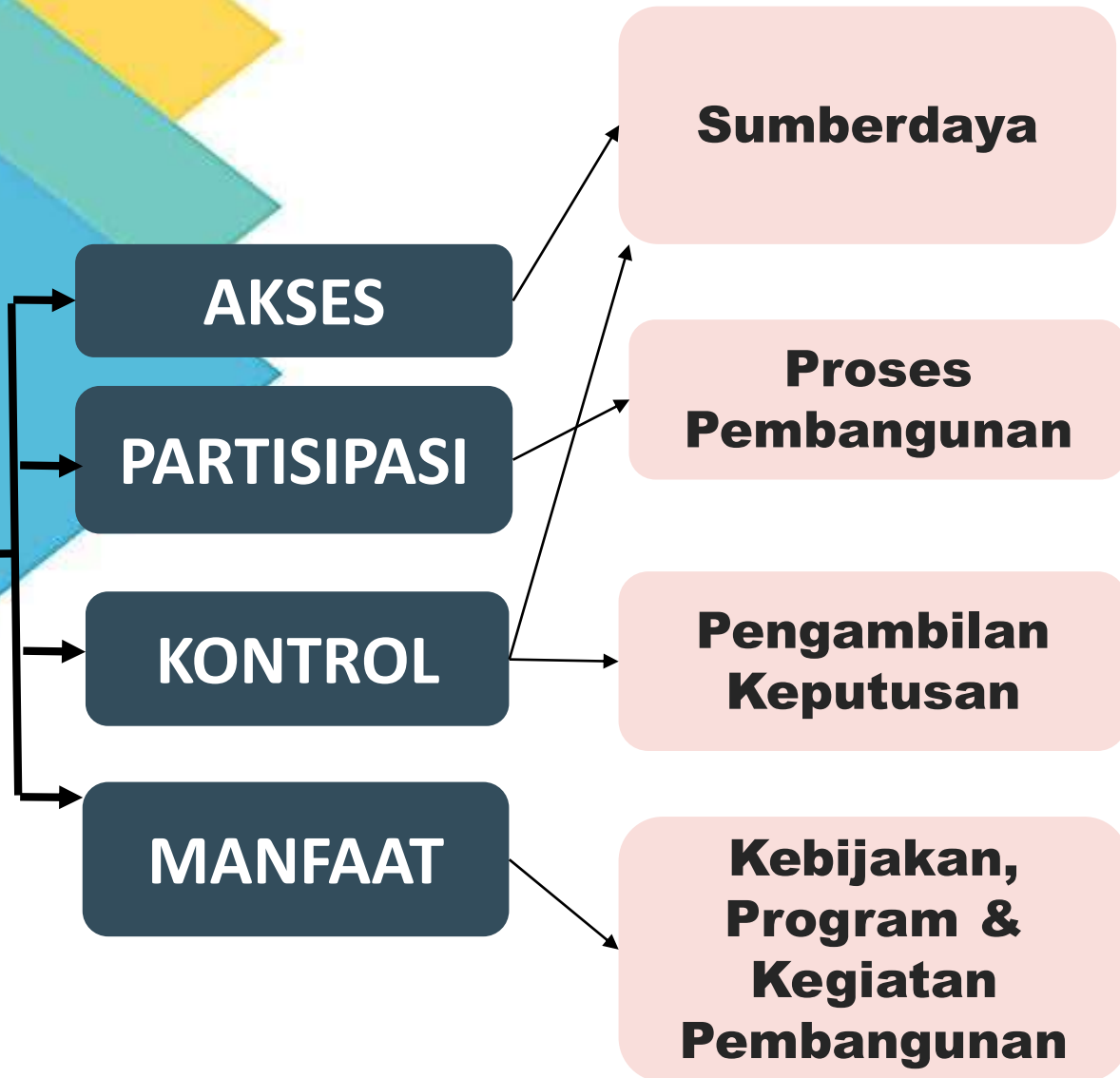
Kategori Tiga:

Kegiatan dalam mendukung pelebagaan PUG:

- Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG;
- Kegiatan Rakor PUG;
- Pelatihan PPRG;
- Sosialisasi dan Advokasi PUG;
- dan lain-lain.



Ke se ta ra an Ge nd er



Kesempatan yg sama bagi semua pihak terhadap sumberdaya pembangunan (kebijakan, informasi, modal, pelatihan, dll)

Semua pihak dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (disuarakan aspirasi, pengalaman, kebutuhan, masalah)

Semua pihak diikutkan dalam proses pengambilan keputusan

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yg setara bagi semua pihak

PRINSIP ARG

- **Bukan** anggaran yang **terpisah** untuk laki-laki dan perempuan;
- Anggaran yg **menjembatani kesenjangan** gender;
- **Bukan** anggaran yang **dialokasikan sama** untuk laki-laki dan perempuan (50% utk laki-laki dan 50% untuk perempuan);
- **Bukan** anggaran yang diusulkan atau **tambahan** dalam penganggaran;
- **Bukan** anggaran yang **disisihkan sekian %** untuk kepentingan perempuan.

Tidak semua program/kegiatan perlu dikoreksi agar responsif gender

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ARG

1. Pemilihan program/kegiatan yang ada pada RKA yang ada isu gendernya dan akan disusun ARGnya

- lihat kegiatan pada level program yang ada isu gendernya

2. Melakukan analisis gender

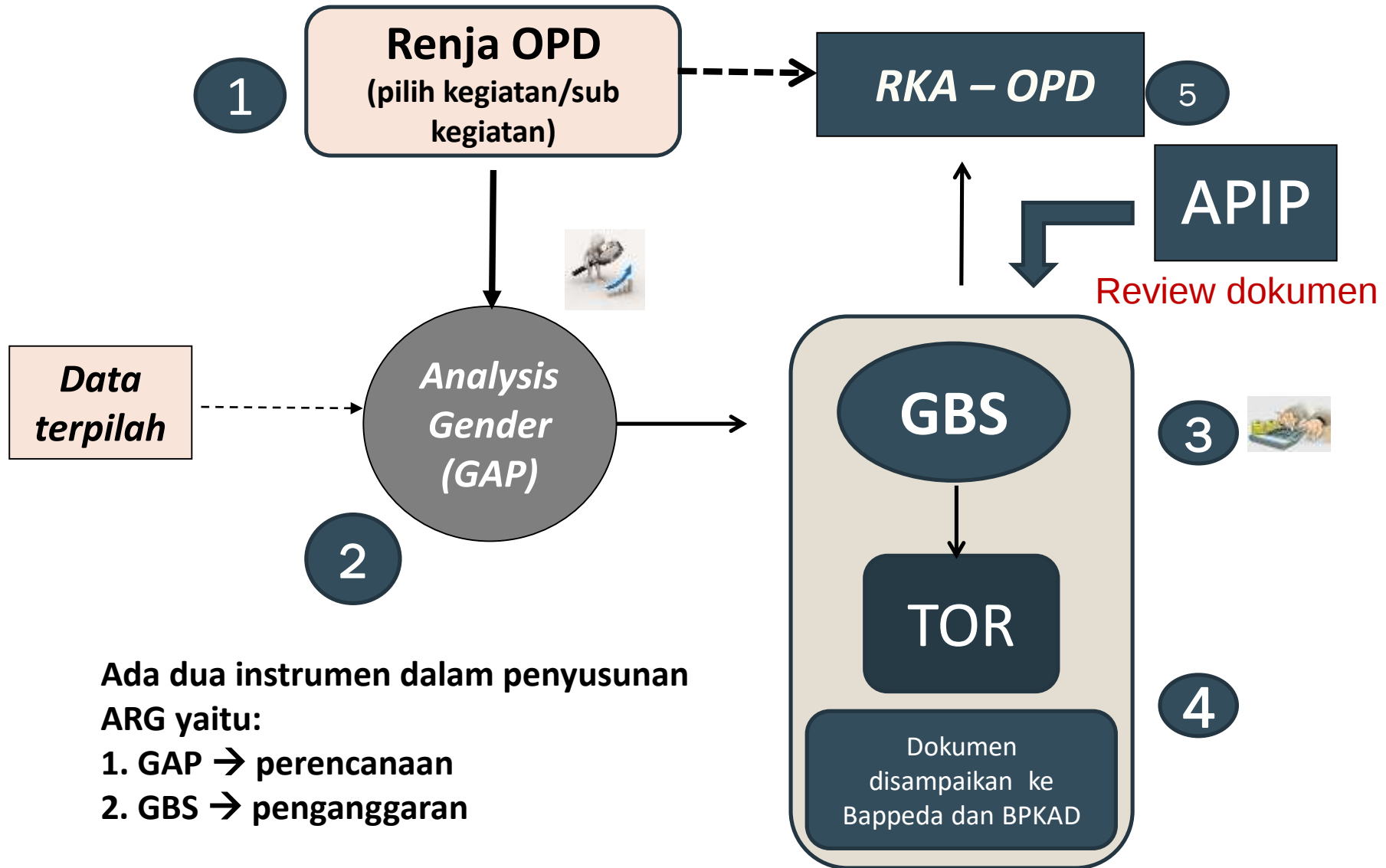
- menggunakan alat analisis gender yang ada, salah satunya adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP);

3. Menyusun GBS

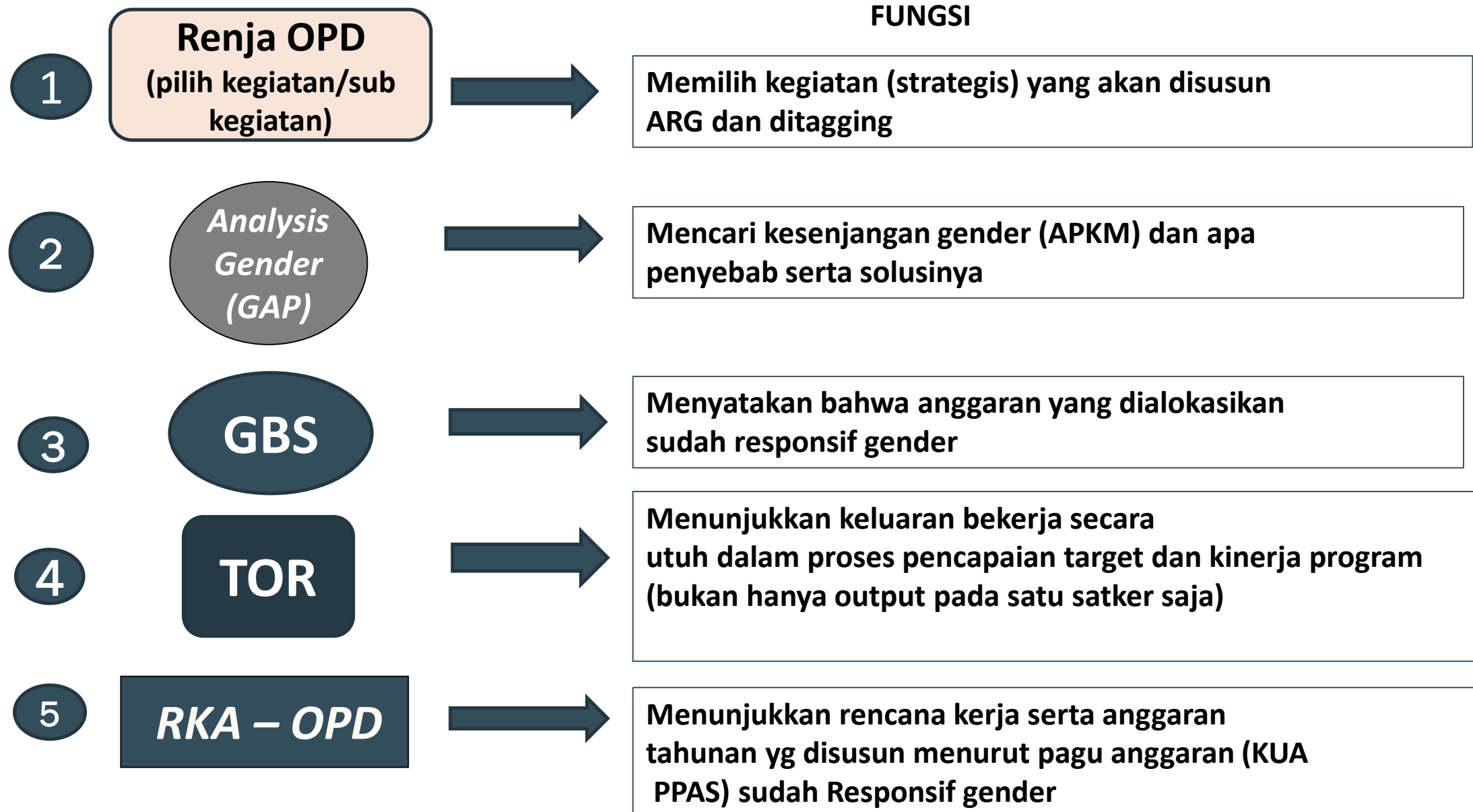
- Informasi yang didapat pada analisis gender, dimasukkan ke dalam dokumen **GBS** yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

4. Menyusun TOR

TAHAPAN PENYUSUNAN ARG



TAHAPAN PENYUSUNAN ARG



Langkah-langkah GAP

Langkah GAP	Deskripsi	Data terpisah/Indikator gender
Langkah 1 : Kebijakan/Program/Kegiatan/Output		
Program	idem	
Kegiatan	idem	
Sub Kegiatan		
Tujuan Sub Kegiatan	1. Mengikut Renstra, Renja dan terutama target SIPD	Tujuan SMART. Data kuantitatif atau data kualitatif dari tujuan.
Contoh: Meningkatkan lalu lintas kunjungan situs web.	2. Berupa data sasaran dan target bisa kuantitatif maupun kualitatif	Contoh: Meningkatkan lalu lintas kunjungan situs web sebesar 20% di akhir tahun
Langkah 2: Data Pembuka Wawasan		
	1. Pengaturan	Pedoman, Panduan, Juklak, Modul yang responsif gender
	2. Data sasaran dari tujuan kegiatan atau penerima manfaat, bisa masyarakat, pegawai, atau kelompok tertentu.	Jumah penduduk L/P, Seks ratio, Usia Sekolah L/P, Angkatan kerja L/P, Pengangguran L/P, pengguna internet L/P dan lain-lain
	3. Pelaku pembangunan	Ketersediaan Guru/dosen L/P, Petugas medis L/P, ketersediaan perencanaan PD yang telah punya sertifikat PPRG,
	4. Data pengalaman kegiatan/ pelatihan/bimtek yang telah dilaksanakan	Jumlah dan % L/P dalam Pelatihan/kegiatan/Bimtek dan lain-lain.

Langkah 3: Faktor Kesenjangan Gender

Akses	Akses dan peran berkaitan dengan kapasitas baik lembaga atau individu;	Apakah proses penyusunan program/kegiatan/output memberikan akses yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan
Partisipasi		Apakah penyusunan program/kegiatan/ouput memberikan partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan
Kontrol	Berkaitan dengan pemberdayaan baik individu, kelompok atau lembaga dalam keterlibatan kontrol atau pengendalian dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan yang tersedia.	Apakah penyusunan program/ kegiatan/ouput memberikan kontrol yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber pembangunan
Manfaat		Apakah hasil program/kegiatan telah memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 4: Faktor Kesenjangan Internal

	Sesuatu terjadi akibat persoalan internal dari lembaga yang bertanggung jawab terhadap program, kegiatan/output	Data yang diperlukan al: Peraturan, Pedoman, Juklak, SOP, Kriteria dan juga SDM sebagai pelaku kegiatan yang tidak atau belum responsif gender.
--	---	--

Langkah 5: Faktor Eksternal		
	Sesuatu terjadi namun di luar kontrol lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan	1. Lembaga seperti KL lain, Pemda. 2. Lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi target program. 3. Kondisi masyarakat sasaran (target group) yang belum kondusif, misalnya: budaya patriarhi, gender stereotype.
Langkah 6: Reformulasi Tujuan		
	Mereformulasi tujuan yang tadinya bias/netral gender menjadi responsif gender. Data bisa kualitatif dan kuantitatif.	Tujuan responsif gender dan SMART Contoh: Menaikkan lalu lintas kunjungan situs web sebesar 20% di akhir tahun yang seimbang baik laki-laki maupun perempuan
Langkah 7: Rencana Aksi		
	Merupakan solusi atau pemecahan persoalan yang teridentifikasi dalam langkah 4 dan 5 dan akan menjadi input untuk penyusunan Sub-Sub kegiatan dari satu Kegiatan	Contoh; 1. Mereviu panduan atau Juklak/Juknis; 2. Sosialisasi dan advokasi baik untuk internal maupun untuk eksternal 3. Pendataan/pencatatan 4. Surat edaran/Panggilan/undangan 5. dan lain-lain yang berkaitan solusi pada langkah 4 dan 5. Catatan: semua rencana aksi perlu ada tujuan, harus SMART.

Langkah 8: Data Dasar (Baseline Data)

	Data yang mengindikasikan data awal yang menunjukkan setelah kegiatan berlangsung akan terjadi perubahan sebagai mana ditunjukkan dalam indikator gender di langkah 9.	
		TPAK 51% perempuan dan 85 % laki-laki; Jumlah perencana bersertifikat PPRG baru 46 dari seluruh OPD

Langkah 9: Indikator Gender

	Indikasi perubahan gender	Output: 1. Jumlah peserta L/P yang mengikuti pelatihan PPRG 2. satu paket revisi Juknis Bintek PPRG
		Outcome: 1. Meningkatnya 60% satker yang melaksanakan ARG.
		Dampak: Meningkatnya jumlah GBS

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Pada level sub kegiatan

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
Pilih Kebijakan/ Program/ Kegiatan Yang Akan Dianalisis	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- line)	Indikator Gender
Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Tujuan Sub Kegiatan : Keluaran Sub Kegiatan : Sasaran Sub Kegiatan :	Sajikan data pembuka wawasan , yang terpilah menurut jenis kelamin : - kuantitatif – kualitatif Data/informasi yang sensitif gender: 1. Aturan/regulasi 2. Sasaran 3. Pelaku kegiatan 4. Pengan yang lalu	Temukenali isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan, yaitu : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Temukenali faktor penyebab isu gender di internal lembaga dan/ atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya ikesenjangan gender	Temukenali faktor penyebab isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan	Rumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan sehingga menjadi responsif gender	Tetapkan rencana aksi yang responsif gender Sebagai solusi kesenjangan gender yang terlihat pada langkah 2,3,4 dan 5	Tetapkan base-line atau data dasar yang akan diubah (diambil dari langkah 2)	Tetapkan indikator gender Indikator output: Indikator outcome :
Lihat dokumen Renja	Lihat data yang ada sesuai Prog/keg	Mengacu kolom 2			Mengacu kolom 1	Mengacu kolom 3.4.5	Mengacu kolom 2	

Format GBS
yang
disesuaikan
RKA PD Baru

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Urusan. : Program : Kegiatan : Sub Kegiatan:	(Diambil dari langkah 1 GAP)	
2	Output Sub kegiatan	(Langkah 9 GAP)	
3	Analisa situasi	(Langkah 2, 3, 4, dan 5)	
4	Rencana Aksi (Langkah 7 GAP)	Akrktivitas 1	1.Nama sub kegiatan yang merupakan tahapan pencapaian suatu output sub kegiatan. Dan di harapkan dapat menangani/ mengurangi permasalahan kesenjangan gender . 2.Tujuan Berisikan informasi mengenai tujuan dari aktivitas2 sub kegiatan (kaitan dgn kesenjangan gender)
		Aktivitas 2	Idem
		Aktivitas 3	idem
		Dst.....	idem
5	Alokasi Anggaran Kegiatan (KUA/PPAS)		Jml angg(Rp) yg dialokasikn utk mencapai suatu output sub kegataaan (merupakan total dana seluruh sub kegiatan yang dianalisis)
6	Dampak/hasil Output Kegiatan (langkah (GAP)		Dampak/hasil secara luas dari Sub Kegiatan yaitu Output dan Outcome dikaitkan dg isu gender serta perbaikan ke arah KKG

FORM KAK/TOR

Program		
Sasaran kegiatan/sub kegiatan		
Kegiatan/sub kegiatan		
Latar Belakang	Dasar Hukum	
	Gambaran Umum	
Kegiatan	Uraian kegiatan/sub kegiatan	
	Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan	
	Batasan kegiatan	
Maksud dan Tujuan/Target sasaran (capaian)		
Cara pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan		
Tempat pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan		
Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan		
Jadwal		
Biaya kegiatan/sub kegiatan		

KETERKAITAN GAP, GBS DAN TOR

Langkah-Langkah	GAP	GBS	TOR
Langkah 1	Kebijakan/program /kegiatan	Program, kegiatan, IKK, Output kegiatan	Bagian depan TOR/Judul
Langkah 2	Data pembuka wawasan	Analisis situasi	Gambaran umum di latar belakang
Langkah 3	Faktor kesenjangan	Analisis situasi	Analisis situasi
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal	Analisis situasi	Analisis situasi
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal	Analisis situasi	Analisis situasi
Langkah 6	Reformulasi tujuan	Tujuan output /subouput	Penerima manfaat
Langkah 7	Rencana aksi	Rencana aksi berkontribusi kepada kesetaraan gender)	Strategi pencapaian keluaran (memuat seluruh aktifitas dalam mencapai output)
Langkah 8	Data dasar (baseline)	Analisis situasi	Gambaran umum di latar belakang
Langkah 9	Indikator gender	Dampak/hasil output kegiatan	Gambaran umum di latar belakang



ysupiandi, 13-14 Oktober,
2021



PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

**Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah**



PERMENDAGRI 77 TAHUN 2019

**Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah**



KRITERIA PEMILIHAN KEGIATAN RESPONSIF GENDER (TEMATIK ARG)

Kategori satu:

Kegiatan yang dianggap mampu mengurangi atau menghilangkan adanya kesenjangan gender yaitu:

- Kegiatan yang dapat memberikan akses dan peran kepada perempuan dan laki-laki secara proporsional;
- Kegiatan yang memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki;
- Kegiatan yang dapat melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses dan tahapan-tahapan kegiatan.

Kategori dua:

Kegiatan yang khusus untuk menangani spesifik gender:

- Kegiatan bantuan perbaikan gizi bagi Ibu Hamil;
- Kegiatan KB pria;
- Pembinaan Kelompok Tani Wanita;
- Bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan UMK;
- dan lain-lain.

Kategori Tiga:

Kegiatan dalam mendukung pelebagaan PUG:

- Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG;
- Kegiatan Rakor PUG;
- Pelatihan PPRG;
- Sosialisasi dan Advokasi PUG;
- dan lain-lain.



ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)

Anggaran Khusus Target Gender:

Alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar satu kelompok berdasarkan hasil analisis gender.

Anggaran Kesetaraan Gender:

Alokasi anggaran untuk mengatasi masalah **kesenjangan gender**. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya.

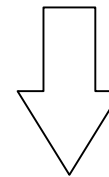
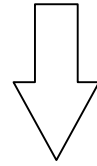
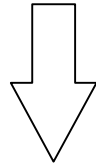
Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender:

Alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender. Kategori anggaran ini mencakup beberapa hal seperti pengembangan data pilah, maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia terkait dengan Pengarusutamaan Gender. (Modul PPRG, KPPPA)

Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan
(Permendagri 050-3708 tahun 2020)

SEMULA

-	Program	Kegiatan
---	---------	----------



MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
---------	----------	--------------



Taging ARG

Praktek Penyusunan GAP, GBS & KAK



LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK								

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolic -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, 2021 -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i> nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun							

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolic -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i> nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupeten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam meminum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	45					

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i> nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupeten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam meminimum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	- Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	46				

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i>nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupeten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%).	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam minum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	- Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	• Masing Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang stunting dan adaptasi perubahan perilaku • Faktor penyebab tertinggi angka stunting adalah tingkat perekonomian yang masih rendah • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. • Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar • Masih banyaknya perkawinan dibawah umur • Masih belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan stunting				

PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolic -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i>nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%).	Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam meminum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	-Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	• Faktor penyebab tertingginya angka stunting adalah tingkat perekonomian yang masih rendah • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. • Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar • Masih banyaknya perkawinan dibawah umur • Masih belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan stunting	Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	• Pelaporan TPPS 12 Kab/Kota se provinsi • Pertemuan Evaluasi tindak lanjut Rekomendasi hasil AKS Kab/Kota • Monev Tim Pendampingan Keluarga Kab/Kota • Sosialisasi Pencegahan Stunting di Area Car Free Day • Talk Show • Sosialisasi Stunting di Sekolah dan Universitas • Monev TPPS dan Penilaian Kinerja Stunting Kab/Kota • Monev dan Pendampingan Kab/Kota dalam Implementasi Dokumen SKPP Percepatan Penurunan Stunting • Advokasi Kelompok Masyarakat Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting		
---	---	---	--	---	---	--	--	--

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, 2021 -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i> nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam meminum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	- Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	• Masing Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang stunting dan adaptasi perubahan perilaku • Faktor penyebab tertingginya angka stunting adalah tingkat perekonomian yang masih rendah • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. • Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar • Masih banyaknya perkawinan dibawah umur • Masih belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan stunting	Meningkatkan upaya percepatan Penurunan Stunting melalui Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	• Rapat Rapat Bidang dan Sekretariat TPPS Provinsi Riau • Penilaian Kinerja Stunting • Pertemuan Asistensi Pelaporan TPPS 12 Kab/Kota se provinsi • Pertemuan Evaluasi tindak lanjut Rekomendasi hasil AKS Kab/Kota • Monev Tim Pendampingan Keluarga Kab/Kota • Sosialisasi Pencegahan Stunting di Area Car Free Day • Talk Show • Sosialisasi Stunting di Sekolah dan Universitas • Monev TPPS dan Penilaian Kinerja Stunting Kab/Kota • Monev dan Pendampingan Kab/Kota dalam Implementasi Dokumen SKPP Percepatan Penurunan Stunting • Advokasi Kelompok Masyarakat Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting		

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolic -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, vsupriandi, 13-14 Oktober, 2021 -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i> nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam minum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	- Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	• Masing Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang stunting dan adaptasi perubahan perilaku • Faktor penyebab tertingginya angka stunting adalah tingkat perekonomian yang masih rendah • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. • Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar Masih banyaknya perkawinan dibawah umur • Masih belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan stunting	Meningkatkan upaya percepatan Penurunan Stunting melalui Fasilitasi Pembimbingan dan Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	• Rapat Rapat Bidang dan Sekretariat TPPS Provinsi Riau • Penilaian Kinerja Stunting Pertemuan Asistensi Pelaporan TPPS 12 Kab/Kota se provinsi • Pertemuan Evaluasi tindak lanjut Rekomendasi hasil AKS Kab/Kota • Monev Tim Pendampingan Keluarga Kab/Kota • Sosialisasi Pencegahan Stunting di Area Car Free Day • Talk Show • Sosialisasi Stunting di Sekolah dan Universitas • Monev TPPS dan Penilaian Kinerja Stunting Kab/Kota • Monev dan Pendampingan Kab/Kota dalam Implementasi Dokumen SKPP Percepatan Penurunan Stunting • Advokasi Kelompok Masyarakat Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	• Angka Stunting Nasional s.d Tahun 2022 adalah 21.6 % angka ini menunjukkan penurunan sebesar 2.8 point dari tahun sebelumnya 24.4 %; • Angka Stunting Provinsi Riau tahun 2021 masih sebesar 22,3, perlu upaya maksimal untuk mencapai target nasional yaitu 14 % ditahun 2024; • Capaian Stunting Tahun 2022 adalah sebesar 17 %. • Masih terdapat angka stunting yang diatas Stunting Provinsi Riau (22.3) di kab/Kota, yaitu : Rokan Hilir 29.7 Inhil 28.4 Rohul 25.80 Kampar 25.70 Inhu 23.60, Meranti 23.30, Dumai 23.00, Kuansing 22.40 • Prevalensi Stunting Provinsi Riau Tahun 2022 turun sebesar 5.3 % • Sembilan kab/kota dengan prevalensi stunting turun, penurunan terbesar di kab. Rokan Hilir 15 % dan Bengkalis 13.5 % • 3 kab/kota prevalensi stunting menunjukkan angka kenaikan stunting tahun 2022 yakni kab. Siak, Inhil dan Kota Pekanbaru.	

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAI DPA TAHUN 2021	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGANEKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASELINE)	INDIKATOR GENDER
Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bidang Urusan: PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan: Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Tujuan Kegiatan: Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungnya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i>nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun	- Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam minum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting	- Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting	• Masing Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang stunting dan adaptasi perubahan perilaku • Faktor penyebab tertingginya angka stunting adalah tingkat perekonomian yang masih rendah • Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. • Masih Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar • Masih banyaknya perkawinan dibawah umur • Masih belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam penanggulangan stunting	Meningkatkan upaya percepatan Penurunan Stunting melalui Fasilitasi Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK	• Rapat Rapat Bidang dan Sekretariat TPPS Provinsi Riau • Penilaian Kinerja Stunting • Pertemuan Asistensi Pelaporan TPPS 12 Kab/Kota se provinsi • Pertemuan Evaluasi tindak lanjut Rekomendasi hasil AKS Kab/Kota • Monev Tim Pendampingan Keluarga Kab/Kota • Sosialisasi Pencegahan Stunting di Area Car Free Day • Talk Show • Sosialisasi Stunting di Sekolah dan Universitas • Monev TPPS dan Penilaian Kinerja Stunting Kab/Kota • Monev dan Pendampingan Kab/Kota dalam Implementasi Dokumen SKPP Percepatan Penurunan Stunting • Advokasi Kelompok Masyarakat Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting	• Angka Stunting Nasional s.d Tahun 2022 adalah 21.6 % angka ini menunjukan penurunan sebesar 2.8 point dari tahun sebelumnya 24.4 %; • Angka Stunting Provinsi Riau tahun 2021 masih sebesar 22,3, perlu upaya maksimal untuk mencapai target nasional yaitu 14 % ditahun 2024; • Capaian Stunting Tahun 2022 adalah sebesar 17 %. • Masih terdapat angka stunting yang diatas Stunting Provinsi Riau (22.3) di kab/Kota, yaitu : Rokan Hilir 29.7 Inhil 28.4 Rohul 25.80 Kampar 25.70 Inhu 23.60, Meranti 23.30, Dumai 23.00, Kuansing 22.40 • Prevalensi Stunting Provinsi Riau Tahun 2022 turun sebesar 5.3 % • Sembilan kab/kota dengan prevalensi stunting turun, penurunan terbesar di kab. Rokan Hilir 15 % dan Bengkalis 13.5 % • 3 kab/kota prevalensi stunting menunjukan angka kenaikan stunting tahun 2022 yakni kab. Siak, Inhil dan Kota Pekanbaru.	Output : Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dengan berbagai aspeknya sebagai upaya menurunkan angka Stunting Outcome : Persentase Penurunan Stunting 16 %

Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
Analisis Situasi	-Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting -Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kebang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama -Dampak jangka pendek stunting adalah tergangungya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan matebolisme -sedangkan dampak jangka panjang adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolic -Angka stunting Provinsi Riau 23,2 th 2021 menjadi 17,0 tahun 2022, sedangkan tahun 2023 adalah 13,6, -ada 3 Kabupaten/Kota yang angka prevalensi <i>stunting</i>nya naik dibanding tahun 2021 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupeten Siak, dan Kota Pekanbaru -sementara terdapat 3 Kabupaten dengan penurunan angka prevalensi stunting tertinggi dari tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bengkalis (8.4%), upaten Rokan Hilir (14.7%) , dan Kabupaten Kampar (14.5%). -Target Penurunan Stunting -Target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun - Akses : Kurangnya informasi tentang gizi terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Keterampilan Ibu dalam menerapkan Pola asuh yang baik dan benar. - Partisipasi : Masih rendahnya partisipasi penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur; Kurangnya partisipasi remaja dalam meminum Tablet Tambah Darah serta perilaku diet yang tidak sehat Masih rendahnya partisipasi 3 T (Terlalu Muda, Tua, Dekat,) - Kontrol : Masih tingginya Un Need Meet - Manfaat : Belum semua masyarakat terpapar tentang stunting, dampak dan pencegahan stunting Internal -Kurangnya SDM berkualitas dalam percepatan penurunan stunting; -Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam percepatan penurunan stunting External
Rencana Aksi	• Rapat Rapat Bidang dan Sekretariat TPPS Provinsi Riau • Penilaian Kinerja Stunting • Pertemuan Asistensi Pelaporan TPPS 12 Kab/Kota se provinsi • Pertemuan Evaluasi tindak lanjut Rekomendasi hasil AKS Kab/Kota • Monev Tim Pendampingan Keluarga Kab/Kota • Sosialisasi Pencegahan Stunting di Area Car Free Day • Talk Show • Sosialisasi Stunting di Sekolah dan Universitas • Monev TPPS dan Penilaian Kinerja Stunting Kab/Kota • Monev dan Pendampingan Kab/Kota dalam Implementasi Dokumen SKPP Percepatan Penurunan Stunting • Advokasi Kelompok Masyarakat Perubahan Perilaku dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting
Alokasi Anggaran sub	Rp. 600.000.423,-
Dampak/ Hasil:	Output :



TERIMA KASIH

Perempuan Berdaya Anak Terlindungi INDONESIA MAJU

